

Lampiran Laporan Rekapitulasi Penerimaan PKB Tahun 2019
Lampiran Laporan Rekapitulasi Penerimaan PKB Tahun 2020
Lampiran Rekapitulasi Penerimaan Kasir Tahun 2021
Lampiran Laporan Rekapitulasi Penerimaan PKB Tahun 2022
Lampiran Laporan Rekapitulasi Penerimaan PKB Tahun 2023
Lampiran Laporan Potensi Obyek Kendaraan Bermotor Tahun 2019
Lampiran Laporan Potensi Obyek Kendaraan Bermotor Tahun 2020
Lampiran Rekapitulasi Kendaraan Yang Keluar Lain Provinsi
Lampiran Laporan Potensi Obyek Kendaraan Bermotor Tahun 2022
Lampiran Laporan Potensi Obyek Kendaraan Bermotor Tahun 2023
Lampiran Tabulasi Data
Lampiran Output SPSS
Lampiran Surat Permohonan Izin Pengambilan Data
Lampiran Balasan Permohonan Izin Pengambilan Data Dari Bapenda
Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

BAB I PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Tujuan nasional yang digariskan dalam konstitusi negara Indonesia, meningkatkan standar hidup warganya melalui pengembangan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber

daya manusia. Di Indonesia, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai otonomi daerah membantu memastikan bahwa kesejahteraan umum didistribusikan secara adil.

Seperti dinyatakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip otonomi dan tugas administratif menjadi dasar dari pemerintah daerah. Pada intinya, otonomi adalah pelimpahan kekuasaan kepada bagian negaranya, terutama yang berkaitan dengan pendanaan program-program pembangunan agar tidak bergantung pada subsidi (Sitompul & Lubis, 2013).

Di antara kekuasaan pemerintah daerah terdapat pengawasan anggaran daerah. Pengelolaan operasi pemerintah sangat bergantung pada keuangan. Pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah merupakan beberapa cara yang sah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak regional merupakan salah satu instrumen vital untuk mendanai pengembangan regional dan manajemen pemerintah, serta untuk mewujudkan dan meningkatkan kemandirian yang aktual dan bertanggung jawab. Adapun pajak kendaraan, pajak properti dan konstruksi, pajak hotel dan restoran, pajak atas hiburan dan reklame, pajak air tanah dan sarang burung walet, pajak atas reklame, semuanya dipungut pemerintah daerah.

Penerimaan PKB merupakan penerimaan paling besar dibanding dengan sumber pajak daerah lainnya (Manfaris, 2024). Memiliki kendaraan bermotor berarti harus membayar pajak kendaraan bermotor. Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bertanggung jawab atas administrasi kendaraan bermotor untuk memfasilitasi layanan masyarakat, dan mereka mengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Proses mutasi dan peralihan jenis kendaraan, memengaruhi jumlah kendaraan terdaftar dan pajaknya. Ketika pemilik melakukan mutasi, maka proses pembayaran PKB harus dilakukan di Samsat. Mutasi kendaraan mencakup perubahan data kepemilikan dan lokasi kendaraan dalam sistem Samsat. Pembayaran PKB saat mutasi bertujuan untuk memastikan setiap kendaraan tercatat dan dikenakan pajak sesuai wilayah domisilinya (Machfiroh & Sur, 2023).

Salah satu daerah otonom dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia adalah Kota Semarang. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa populasi Semarang akan mencapai 1.694.743 jiwa pada tahun 2023. Dengan berbagai macam kegiatan ekonomi sosial yang terjadi di Kota Semarang, maka permintaan akan transportasi juga meningkat. Transportasi kendaraan bermotor digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan juga distribusi barang kebutuhan.

Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah menjadi pusat perekonomian tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun juga mendorong urbanisasi yang signifikan. Arus migrasi yang terjadi di Kota Semarang cukup tinggi, menurut data terdapat sekitar 16.453 orang mutasi masuk dari luar kota memilih saat Pemilihan Umum 2024 di Kota Semarang. Sedangkan mutasi keluar, pemilih yang ke daerah lain tercatat 10.874 orang (Zuhdiar Laeis, 2024).

Tabel 1.1 Total Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Tahun	Total Kendaraan Bermotor
2019	1.651.895
2020	1.693.227
2021	1.875.781
2022	1.875.781
2023	1.917.278

Sumber : Data Kota Semarang

Berdasar **Tabel 1.1** diketahui bahwasanya total kendaraan bermotor terdaftar di Kota Semarang yang diregristrasi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2022 dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 41.497 unit. Sedangkan antara tahun 2021 dengan 2022 terjadi perubahan sistem pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada awal 2022 sehingga data belum terintegrasi. Namun bisa ditarik informasi yang pasti, pada tahun 2023 total kendaraan bermotor 1.917.278 unit, yang berarti jumlah ini melebihi jumlah penduduk yang telah dijelaskan sebelumnya.

Semarang Barat memiliki letak strategis yang menjadikannya sebagai kawasan dengan aksesibilitas tinggi di Kota Semarang. Kawasan ini terhubung dengan jaringan transportasi darat dan laut. Posisi geografis yang strategis ini tidak hanya memudahkan mobilitas penduduk, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga Semarang Barat merupakan lokasi yang ideal untuk segala aktivitas, termasuk penelitian.

Samsat III Semarang yang terletak dikawasan yang padat kendaraan tepatnya di Jalan Hanoman Nomor 2, Siliwangi, Krapyak. Terdapat lima kecamatan di wilayah kerja Samsat III Semarang yaitu Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen dan Gunung Pati. Dengan pertimbangan wilayah kerja yang luas dan tingginya aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan transaksi di Samsat, memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis dinamika jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Samsat III Semarang

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TAHUN PAJAK					JUMLAH PER JENIS
	2019	2020	2021	2022	2023	
A1 Mobil Penumpang - Sedan - Pribadi	4.958	4.723	3.664	4.527	4.255	22.127
A2 Mobil Penumpang - Sedan - Umum	285	155	72	76	29	617
A4 Mobil Penumpang - Sedan - Pemerintah	38	35	27	31	39	170
B1 Mobil Penumpang - Jeep - Pribadi	3.988	3.919	3.308	4.311	4.267	19.793
B4 Mobil Penumpang - Jeep - Pemerintah	24	22	15	17	18	96
C1 Mobil Penumpang - Minibus - Pribadi	53.589	52.614	38.693	50.861	51.479	247.236
C2 Mobil Penumpang - Minibus - Umum	576	1.079	180	149	73	2.057
C4 Mobil Penumpang - Minibus - Pemerintah	288	290	195	223	221	1.217
D1 Mobil Bus - Microbus - Pribadi	2.445	2.467	155	188	238	5.493
D2 Mobil Bus - Microbus - Umum	148	127	197	246	232	950
D4 Mobil Bus - Microbus - Pemerintah	5	6	9	17	17	54
E1 Mobil Bus - Bus - Pribadi	10	9	9	11	25	64
E2 Mobil Bus - Bus - Umum	61	87	42	97	103	390
E4 Mobil Bus - Bus - Pemerintah	1	1	-	2	1	5
F1 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pribadi	1.920	1.899	6.660	8.303	8.043	26.825
F2 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Umum	10	11	98	110	53	282
F4 Mobil Barang / Beban - Pick Up - Pemerintah	19	18	33	42	37	149
G1 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pribadi	2.066	2.059	3.600	4.733	4.993	17.451
G2 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Umum	771	589	478	492	355	2.685
G4 Mobil Barang / Beban - Light Truck - Pemerintah	41	45	29	44	40	199
H1 Mobil Barang / Beban - Truck - Pribadi	653	641	637	747	780	3.458
H2 Mobil Barang / Beban - Truck - Umum	1.564	1.558	1.097	1.376	1.586	7.181
H4 Mobil Barang / Beban - Truck - Pemerintah	9	13	5	9	5	41
I1 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pribadi	1.116	1.260	1.235	1.585	1.549	6.745
I2 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Umum	-	-	1	-	-	1
I4 Mobil Barang / Beban - Blind Van - Pemerintah	-	-	-	-	-	-
J1 Sepeda Motor - Roda Dua - Pribadi	232.374	221.490	183.561	224.118	222.763	1.084.306
J4 Sepeda Motor - Roda Dua - Pemerintah	478	457	346	389	412	2.082
K1 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pribadi	602	629	453	542	518	2.744
K4 Sepeda Motor - Roda Tiga - Pemerintah	16	19	15	21	25	96
JUMLAH PER TAHUN	308.055	296.222	244.814	303.267	302.156	

Sumber : UPPD Samsat III Semarang

Berdasarkan **Tabel 1.2** volume kendaraan terdaftar di Samsat III Semarang sangat beragam dan pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, jumlah kendaraan di Samsat III Semarang terdapat sekitar 18 persen dari total kendaraan di Kota Semarang. Jumlah pajak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang merupakan pajak untuk kendaraan bermotor. Menurut penelitian dilakukan oleh Suharyadi dkk (2019), ditemukan korelasi positif sebesar 0,966 atau 96,6% antara PKB dan pajak daerah.

Pendapatan pajak daerah Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Namun pendapatan pajak tidak selalu meningkat saat meningkatkan jumlah kendaraan bermotor, karena alasan-alasan di luar kendali. Salah satunya yaitu mutasi sebagai faktor administratif atas kondisi kendaraan seperti perpindahan kepemilikan atau lokasi pendaftaran kendaraan.

Tabel 1.3 Data Terkait di Samsat III Semarang

Tahun Pajak	Jumlah Kendaraan	Mutasi Masukan	Mutasi Keluaran	Pajak Daerah
2019	297.216	4.432	4.182	393.331.359.830
2020	285.432	6.110	6.401	306.611.422.300
2021	230.529	4.247	3.995	320.010.095.100
2022	285.265	6.021	5.385	353.094.804.300
2023	284.099	5.594	5.174	347.116.853.900

Sumber : UPPD Samsat III Semarang

Tabel 1.3 memaparkan bahwa tingkat fluktuasi tidak selalu sejalan. Data jumlah kendaraan lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Mutasi masukan dianggap bisa meningkatkan penerimaan pajak begitupun sebaliknya dengan mutasi keluaran yang bisa mengurangi penerimaan pajak (Saputra, 2018), namun data diatas tidak bisa sejalan dengan penelitian sebelumnya.

Jumlah kendaraan bermotor memberikan gambaran yang jelas tentang kepadatan lalu lintas. Tarif untuk objek pajak kendaraan bermotor sebagai pajak daerah bersifat fleksibel, tergantung aturan setiap daerah. Seringkali terjadi kompetisi penyesuaian tarif untuk menarik atau mempertahankan.

Pengaturan tarif PKB yang sedemikian rupa masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain (Purnamawati, 2021). Masyarakat dengan mobilitas tinggi cenderung ingin mengurangi pengeluaran, jika tarif tidak mendukung maka pasti mempertimbangkan pindah. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor terdaftar dianggap lebih penting daripada tarif pajak dalam penerimaan pajak daerah.

Dampak dari jumlah serta kendaraan bermotor yang terdaftar pada pendapatan pajak lokal, khususnya Samsat III Semarang, perlu dicermati dengan seksama. Ketertarikan untuk mengkaji **“Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terdaftar terhadap**

Penerimaan Pajak Daerah Samsat III Semarang” menarik minat penulis untuk meneliti objek dan wilayah ini.

- **Rumusan Masalah**

Peneliti dapat membuat pernyataan masalah dengan menggunakan informasi dari bagian latar belakang, fenomena, dan data yang tersedia berikut :

- Apa pengaruh jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat III Semarang terhadap jumlah penerimaan pajak daerah?
- Apa pengaruh mutasi input kendaraan bermotor terdaftar terhadap penerimaan pajak daerah di Samsat III Semarang?
- Apa pengaruh mutasi output kendaraan bermotor terdaftar di Samsat III Semarang terhadap penerimaan pajak daerah?

- **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- **Tujuan**

- Untuk mengetahui penerimaan pajak daerah Samsat III Semarang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor terdaftar.
- Untuk mengetahui pengaruh perubahan data registrasi masukan kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Samsat III Semarang.
- Untuk mengetahui dampak perubahan data registrasi keluaran dan modifikasi kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Samsat III Semarang.

- **Manfaat**

- Secara teoritis untuk menerapkan, menguji dan mengembangkan teori yang telah dipelajari terkait perpajakan selama perkuliahan.

- Secara praktis diharapkan dapat menjadi penyambung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan kesadaran dan kepatuhan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan studi ini terdiri dari lima bagian utama:

BAB I PENDAHULUAN

Informasi awal, sinopsis keadaan yang melatarbelakangi suatu masalah, dijelaskan pada bagian pendahuluan. Selain menguraikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, bab pendahuluan juga merangkum topik-topik yang tercakup dalam perumusan masalah. Kerangka organisasi penelitian ini juga dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dasar-dasar teoritis dan deskripsi pengantar dari subjek yang dipilih disajikan dalam tinjauan pustaka. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang dicantumkan sebagai dasar pertimbangan serta pengembangan, kerangka pemikiran beserta hasil sementara atau biasa disebut dengan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, analisis data penelitian, dan prosedur pengumpulan data adalah beberapa dari sekian banyak hal yang dibahas dalam bagian metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian, hasil pengolahan data, analisis hasil penelitian, dan alasan untuk menarik kesamaan dengan temuan penelitian lainnya adalah bagian dari bagian hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan rangkuman hasil akhir, hambatan selama proses penyusunan, serta masukan bagi beberapa pihak yang terkait penelitian ini juga bagi pengembangan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- **Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**
- **Landasan Teori**
- ***Stewardship Theory***

Teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), menggambarkan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan individu, melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu organisasi. Adapun sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihaknya. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik pada umumnya.

Teori ini memberikan gambaran hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan cara memaksimalkan kepuasan prinsipal dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Adnan et al., 2017).